

## EKOLOGI POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

Adiyana Slamet

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[Adiyana.slamet@email.unikom.ac.id](mailto:Adiyana.slamet@email.unikom.ac.id)

Deby Sri Aprilliani

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

[dsriaprilliani@gmail.com](mailto:dsriaprilliani@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to find out about the exploitation of the issue of the Citarum River environmental changes due to the consequences of the political policy to convince voter's heart of West Java Governor Election in 2018. This research uses qualitative approach with case study method, data collection technique is literature study, online data tracking, participatory observation and documentation. Then analyzed in accordance with case study methods. This research showed that issues of environmental change because of political consequences becomes a commodity to convince voter's heart in political communication towards of West Java Governor election 2018.*

*The process of political communication of Governor Candidate by exploiting the issue of political ecology of Citarum River revitalization ahead of West Java Governor Election 2018 using the media and face-to-face with voters especially adjacent to Citarum River, such as the Cimahi city, West Bandung district, Bandung district.*

*The reality of the issue of the political ecology of revitalizing the river Citarum ahead of West Java Governor Election 2018 almost everything utilizes the Citarum river contamination issue. Moreover the political communication of the central government with the release of policies on the rehabilitation of the Citarum River as well as a strategic issue of how the relation of central government policy with the province of West Java became a commodity to convince voters' hearts in West Java.*

**Keywords:** *Political Ecology, Political Communication, Election of West Java Governor 2018*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai eksploitasi isu perubahan lingkungan Sungai Citarum karena konsekuensi kebijakan politik untuk meyakinkan hati pemilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, penelusuran data online, observasi partisipatif dan dokumentasi. yang kemudian dianalisis secara sesuai dengan metode studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa isu perubahan lingkungan karena konsekuensi politik menjadi komoditas untuk meyakinkan hati pemilih dalam komunikasi politik menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Proses komunikasi Politik Kandidat Gubernur dengan memanfaatkan isu ekologi politik revitalisasi Sungai Citarum menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 menggunakan media dan tatap muka langsung dengan pemilih terutama pemilih yang berdekatan dengan sungai Citarum, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Realitas isu ekologi politik revitalisasi Sungai Citarum menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 hampir semuanya memanfaatkan isu penanggulangan tercemarnya sungai Citarum, terlebih lagi komunikasi politik pemerintah pusat dengan keluarnya kebijakan mengenai rehabilitasi sungai Citarum juga sebagai isu strategis bagaimana relasi kebijakan pemerintah pusat dengan provinsi Jawa Barat menjadi komoditas untuk meyakinkan hati pemilih di Jawa Barat

**Kata Kunci:** Ekologi Politik, Komunikasi Politik, Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 polemik Sungai Citarum kembali mencuat, banyak pihak berlomba untuk mempertahankan Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat Jawa Barat, terlebih menurut intepretasi masyarakat sungai Citarum identik dengan sampah, limbah dan polutan. Di sisi lain, menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018, Sungai Citarum dijadikan propaganda oleh beberapa Calon Gubernur Jawa Barat untuk meraih simpati masyarakat Jawa Barat. Pada dasarnya Sungai Citarum merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Jawa Barat. Wacana pengalih fungsian kawasan Sungai Citarum sebagai kawasan komersil sebenarnya bukan hal baru. Sungai Citarum memiliki banyak potensi dan manfaat yang bisa dipergunakan sepenuhnya oleh masyarakat, disitulah banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai potensi bisnis terutama pabrik yang membuang limbah di Sungai Citarum agar menekan biaya pengolahan limbah.

Tema kepedulian terhadap lingkungan menjadi penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan. Masyarakat kekinian yang semula jadi objek kekuasaan yang sewenang-wenang kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang seimbang.

Dalam menghadapi peristiwa politik secara langsung komunikasi politik mempunyai peranan besar di dalamnya, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di dalam struktur masyarakat, ini dipertegas oleh pendapat Gazali bahwa komunikasi politik dalam pemilihan umum yaitu :

“Komunikasi politik adalah suatu keahlian/kemampuan untuk menyampaikan berbagai informasi politik (langsung atau tidak langsung, memakai media atau tidak) (komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok) dengan tujuan memberi informasi yang cukup untuk suatu “*informed political action*” dan “*informed political choice*” (tindakan politik atau pilihan politik yang berpengetahuan cukup)”<sup>1</sup>.

Isu revitalisasi Sungai Citarum merupakan sebuah bukti kepedulian masyarakat Jawa Barat untuk peduli pada Basungai Citarum. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 point D tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatakan bahwa :

“lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya

---

<sup>1</sup> Adiyana Slamet, Komunikasi Politik Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (*Studi Kasus Pada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Jawa Barat*)

sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.”

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Sungai Citarum bisa dijadikan sebagai salah satu pesan komunikasi politik menjelang Pemilihan Gubernur di Jawa Barat tahun 2018 yang akan berlangsung.

Sungai Citarum bisa dijadikan salah satu isu strategis mengenai ekologi politik menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 karena persepsi sebagian masyarakat Jawa Barat pada Sungai Citarum memiliki kesan khusus yang membawa harmoni sehingga dapat menarik simpati masyarakat Jawa Barat bagi siapa yang mempedulikannya. Gambaran persoalan lingkungan hidup dan berbagai usaha penyelesaian lingkungan belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena sebenarnya usaha pelestarian lingkungan hidup mempunyai berbagai dimensi. Salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan adalah dimensi politik dan perlunya komitmen dan kesadaran yang sangat tinggi. Sudah waktunya sebenarnya kita berfikir bahwa persoalan lingkungan hidup perlu didekati dengan dimensi politik. Di sebuah

negara demokratis, kader politik menjadi pilarnya. Politik menghasilkan kader yaitu mereka yang akan maju pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang memberikan alternatif kebijakan, tentunya termasuk ikut menentukan siapa yang akan menjabat atau duduk dalam sebuah jabatan publik. Isu lingkungan sebenarnya merupakan isu yang cukup strategis, maka tidak heran apabila ada calon Gubernur yang visi dan misinya pro terhadap pelestarian lingkungan.

Ketika lingkungan hidup menjadi permasalahan khususnya Sungai Citarum, maka peneliti mengangkat masalah ini menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Masalah Sungai Citarum selalu muncul kembali di akhir masa jabatan Gubernur yang masa jabatannya akan berakhir. Peneliti ingin mengetahui isu ekologi politik revitalisasi Sungai Citarum sebagai pesan politik meyakinkan hati pemilih menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan politik terhadap kepedulian revitalisasi Sungai Citarum. Dalam melakukan komunikasi politik dengan menggunakan isu ekologi politik revitalisasi Sungai Citarum disitulah terdapat sebuah pencapaian, adalah harapan yang ditujukan, ditujukan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Harapan inilah yang diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat Jawa Barat untuk menyadari

bahwasanya sungai Citarum merupakan salah satu warisan terbesar yang harus di jaga.

## 1.2. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana proses *komunikasi Politik Kandidat Gubernur dengan memanfaatkan isu ekologi politik revitalisasi* Sungai Citarum menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018?
2. Bagaimana realitas *isu ekologi politik revitalisasi* Sungai Citarum menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018?

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1. Konsep Komunikasi Politik

Menurut Maswadi Rauf (dalam Rauf dan Nasrun, 1993:20), studi komunikasi politik mencakup dua disiplin dalam ilmu-ilmu sosial; ilmu politik dan ilmu komunikasi. Komunikasi politik bisa dijadikan kajian oleh ilmuwan komunikasi seperti halnya ilmuwan politik. Kelihatannya buku-buku teks tentang komunikasi politik lebih banyak ditulis oleh ilmuwan komunikasi daripada ilmuwan politik. Barangkali ini menandakan bahwa ilmu komunikasi lebih erat berhubungan dengan komunikasi politik, dari pada ilmu politik.

Komunikasi politik mempelajari mata rantai antara komunikasi dan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik. Namun jika disimak dari berbagai literatur, komunikasi politik telah menjadi kajian tersendiri sejak diakui oleh organisasi Ilmiah International Communication Association bersama divisi lain, seperti divisi sistem informasi, komunikasi antarpribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antara budaya, komunikasi intruksional, dan komunikasi kesehatan (Ardianto dan Q-nees, 2007 : 35).

Perlu dibedakan dantara komunikaksi politik sebagai kegiatan politik dan studi komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan kegiatan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Komunikasi politik sebagai kegiatan politik berkaitan erat dengan komunikasi sebagai kegiatan ilmiah.

Komunikasi dalam pengertian yang kedua adalah kegiatan ilmiah yang megkaji komunikasi politik sebagai salah satu kegiatan politik di dalam sistem politik. Jadi komunikasi politik dalam arti kegiatan politik adalah objek atau masalah yang menjadi fokus perhatian studi komunikasi politik. Studi komunikasi politik bertujuan memahami dan menjelaskan kegiatan-

---

kegiatan politik berupa komunikasi politik sehingga dunia akademis dan masyarakat awam memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai masalah tersebut.

## 2.2. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik, seperti di sistem-sistem politik lainnya, juga diperaktekan dalam kehidupan politik di Indonesia. Tokoh-tokoh politik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, pendapat-pendapat pada berbagai kegiatan kampanye dalam pemilihan umum, dan berbagai pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk kongkret dari kegiatan komunikasi politik dimana tokoh-tokoh partai politik bertindak selaku komunikastor politik. Saluran komunikasi yang dipergunakan bisa berbentuk media massa, bisa juga berbentuk tatap muka atau pertemuan langsung.

Menurut Doris Graber (Cangara, 2011) menyatakan bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik misalnya boikot, protes dan unjuk rasa. Dengan demikian maka komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses penciptaan symbol dan lambang yang berisi pesan politik dari seorang, kelompok, atau lembaga kepada orang lain, kelompok atau lembaga untuk membuka wawasan atau cara berpikir, sehingga membentuk sikap dan

perilaku tertentu seperti yang ditargetkan. Oleh karena itu komunikasi politik berimplikasi dan memiliki konsekuensi pada aktivitas politik.

Kraus dan davis (Arifin, 2001:13) menyampaikan pendapatnya tentang pengertian komunikasi politik yakni komunikasi politik dilukiskan sebagai proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Meadow (Arifin, 2011:16) menyampaikan bahwa komunikasi politik meliputi sebagai bentuk pertukaran simbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik.

Pendapat berbeda disampaikan Nimmo (dalam Muhtadi, 2008:21) mengenai keterlibatan politik seorang kandidat atau sekelompok orang dalam komunikasi politik sebagai berikut :

“Keterbukaan kepada komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik disatu pihak, dan dipihak lain, komunikasi politik juga bisa menekan partisipasi politik, karena itu, manuver-manuver politik yang sering keluar dari sejumlah elit dan aktor politik pada umumnya, pada gilirannya dapat berimplikasi pada pembentukan perilaku individu dan kelompok yang terlibat dalam proses tersebut.

Pesan-pesannya akan menjadi rujukan penting dalam mengambil tindakan-tindakan formal ataupun informal khususnya berkenaan dengan aktivitas politik.”

Sementara jika komunikasi politik dilihat dari segi proses sebagaimana disampaikan oleh McQuil (Pawito, 2009:2) adalah sebagai berikut :

*“All processes of information (including fact, opinion, beliefs, etc) transmission, exchange, and search engaged in the course of institutionalized political activities”* atau dapat dikatakan bahwa semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan, dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh partisipan dalam konteks kegiatan politik yang bersifat melembaga.

Komunikasi politik merupakan himpunan kajian-kajian yang berkaitan dengan politik. hal tersebut disampaikan oleh Arifin (2011:14) sebagai berikut :

“Komunikasi politik dapat disebut sebagai himpunan kajian-kajian yang sudah lama ada, yaitu retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, dan opini publik serta kebijakan komunikasi. Semuanya itu saat ini menjadi cakupan komunikasi politik.”

Nimmo (2006:5-7) menjelaskan bahwa pengertian komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang mengandung pesan-pesan yang bernilai politik yang merupakan akibat aktual dan potensial dari perilaku manusia dalam keadaan pertentangan atau konflik. Secara terperinci Nimmo menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses transaksi sosial yang dipergunakan manusia untuk mengkonstruksi makna yang merupakan imaji tentang dunia, tempat seorang kandidat dan bertukar imaji melalui simbol.

### **2.3. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Menurut Kumolo, Tjahjo. 2017:79 (dalam bukunya Nawa Cita untuk kesahtraan rakyat) Pilkada kini lebih menarik dibicarakan banyak orang, khususnya sejak diselenggarakan secara langsung. Perbincangan yang dimaksud adalah tentang hal ihwal calon kepala daerah dan wakilnya. Lebih jauh, sinyal emen sementara, masyarakat mulai meyakini hubungan kepemimpinan daerah terhadap perikehidupan mereka sendiri dari kepala daerah yang dipilih. Ini mengiindikasikan, di satu sisi, dinamika demokrasi lokal memberi sinyal positif bahwa masyarakat makin dewasa berpolitik walaupun yang menjadi perhatian dalam sejarahnya adalah janji atau program-program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Oleh karena itu, pemerintah, sejak awal reformasi, terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola negara yang demokratis. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan berbagai perubahan atas undang-undang bidang politik dan pemerintahan. Perubahan terhadap undang-undang ini dilakukan agar proses penyelenggaraan pemerintahan dari yang awalnya sentralistik berubah menjadi desentralistik agar terwujud mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sesuai dengan kehendak rakyat, yaitu penyelenggaraan pilkada langsung. (Kumolo, Tjahjo. 2017 : 79-80).

Pelaksanaan pilkada langsung secara serentak ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru menuju *good governance* dan *clean government* yang saling bersinergi dengan Nawa Cita dan pembangunan daerah. Proses demokrasi yang berlangsung di daerah merupakan siklus awal dari perencanaan pembangunan menyangkut hajat kepemimpinan untuk mendapatkan visi pembangunan. Keberhasilan perencanaan pembangunan hingga ke siklus penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi ditentukan dari hasil proses demokrasi lokal. Proses penguatan demokrasi ini akan memperkuat legitimasi pemerintahan dari rakyat melalui

terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas baik di pusat maupun di daerah. (Kumolo, Tjahjo. 2017: 80)

Adapun, penguatan demokrasi di tingkat lokal akan menjamin mutu kepala daerah untuk dapat merencanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien. Jika masyarakat dapat memberikan sumbangsih besar pada daerahnya dengan aktif dan partisipatif pada pilkada, maka awal yang baik dari proses perencanaan pembangunan sudah dapat dipastikan. Singkatnya, pelaksanaan pilkada serentak telah membangun budaya politik baru dengan kebebasan yang beradab dalam demokrasi Indonesia.

Perjalanan demokrasi Indonesia mulai berkembang saat diselenggarakannya pemilu jujur dan adil pada tahun 1999, pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, dan pemilihan kepala daerah langsung yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada bulan Juni di Kutai Kartanegara, hingga pencapaian monumental dengan terlaksananya pemilihan kepala daerah langsung secara serentak pada tahun 2015 dan 2017 yang menampakkan sebuah siklus pelaksanaan yang tertib dan tertata. Penguatan demokrasi melalui pilkada serentak ini dilakukan demi mencapai reformasi penyelenggaraan negara yang lebih baik di era sebelumnya, dimana rutinitas seremonial pilkada masa lalu cenderung

melelahkan, tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan. Selain karena alasan teknis terkait dengan penyusunan regulasi baru tentang pemilu, manfaat utamanya diselenggarakannya pemilu serentak adalah efisiensi biaya. Dengan menggabungkan dua pemilu pada saat bersamaan, diperoleh penghematan anggaran negara. Efisiensi sangat penting, meski kadang dilihat sebagai suatu proses dan bukan sesuatu yang bersifat substantif. Apabila berharap bisa terpilih kepala daerah yang efisien, setidaknya cara untuk mencari dan memperolehnya juga melalui jalan yang efisien pula. (Kumolo, Tjahjo. 2017:80-81)

Wacana awal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang ditetapkan oleh DPR RI Periode 2009-2014, mekanisme pilkada dilakukan oleh DPRD. Namun, wacana ini mendapatkan penolakan dari rakyat, konsekuensinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tidak jadi diterapkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat. Baru kemudian pada masa pemerintahan kabinet kerja terjadi pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD RI dengan hasil pembahasannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini kemudian digantii menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun, Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang ini mendapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi sehingga putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Guna mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi kedalam ketentuan undang-undang pilkada dan dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahap kedua pada 15 Februari 2017, maka pemerintah bersama DPR RI kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. (Kumolo, Tjahjo. 2017: 81)

#### **2.4. Tinjauan Tentang Ekologi Politik**

Politik ekologi, yang menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan dan konflik tidak terlepas dari aspek kepentingan politik-ekonomi. Cara pandang ini berusaha menjelaskan masalah kerusakan lingkungan dengan memperhitungkan aspek kekuasaan, keadilan distribusi, cara pengontrolan, kepentingan jejaring lokal-nasional-global,

kesejarahan, gender, dan peran aktor (Peluso dan Watts, 2001). Ketajaman perspektif politik ekologi terlihat dalam cara memahami kerusakan lingkungan sebagai akibat dari praktik kekuasaan dan pasar. Kerusakan di suatu wilayah bisa jadi karena adanya kekuatan pasar global yang tidak terlibat secara langsung. Kasus konflik dan kebakaran hutan, selalu terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, pasar, dan terutama tentang cara pengontrolan terhadap pengelolaan sumber daya alam<sup>2</sup>.

Definisi ekologi politik, antara lain :

1. Lingkungan hidupnya, terutama yang berkenaan dgn konsekuensi politik dari perubahan lingkungan (Hempel 1996: 150)
2. Mempelajari relasi yang kompleks antara masyarakat dan lingkungan hidupnya melalui analisis yang cermat atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam serta implikasinya bagi kesehatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan (Watts 2001: 257)
3. Menurut Peterson (2000: 53) Politik ekologi adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi dan dinamika

antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. (Hidayat, 2011 : 8)<sup>3</sup>.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lindlof dan Meyer (dalam Mulyana, 2001:148-149) memasukan semua penelitian naturalistik kedalam paradigma interpretif, varian-variannya mencakup teori dan prosedur yang dikenal sebagai etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, psikologi lingkungan, analisis semiotika, dan studi kasus. Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah sistem terbatas atau suatu kasus secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam dari informasi-informasi (Creswell, 1998: 61).

### 4. PEMBAHASAN

Persoalan sungai Citarum kembali mencuat menjelang pemilihan Gubernur di Jawa Barat 2018. Ekologi Politik dalam Komunikasi Politik yang terjadi di Jawa Barat

<sup>2</sup> <http://bisnis-environment.blogspot.com/2011/03/kerusakan-lingkungan-dan-politik.html>

<sup>3</sup> Peterson. 2002, dalam Herman Hidayat, John Haba, & Robert Siburian (eds) (2011). Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2011, hlm: 8

sadar maupun tidak disadari persoalan mengenai Sungai Citarum memang tidak hanya perhatian tetapi jadi perebutan ide pasangan calon lainnya pun dijadikan sebagai alat propaganda untuk sebagian calon gubernur Jawa Barat tahun 2018 untuk merebut hati dan simpati masyarakat di Jawa Barat. Terlebih lagi sungai Citarum merupakan salah satu potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Jawa Barat. Persoalan Citarum yang berlarut-larut dan menjadi pekerjaan rumah semua pihak dinilai seksi dan strategis manakala dihadapkan dengan kontestasi pemilihan yang terjadi dalam dinamika politik lokal yang terjadi di Jawa Barat. Bahkan tidak tanggung – tanggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian khusus kepada sungai terbesar di Jawa Barat tersebut. Citarum yang menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat Jawa Barat.

Dalam kontestasi politik isu citarum dinilai strategis dalam merebut hati pemilih Pertama, Citarum mengalir sepanjang 269 Km dan 27 Juta orang bergantung pada Citarum meliputi wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. 80% warga Jakarta meminum air sulingan Citarum, 42.000 hektar lahan pertanian bergantung pada sungai citarum, 2.822 industri mengandalkan Citarum, 280 ton limbah kimia dihasilkan setiap hari, 1.888 MW listrik dihasilkan Citarum melalui 3

PLTA yakni; di Waduk saguling, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata. Selain itu pun terdapat 3.000 industri di sepanjang DAS Citarum.

Begitu pentingnya Citarum ini maka, persoalan citarum menjadi persoalan ide gagasan pasangan calon untuk berlaga di pertarungan Pilgub Jawa Barat. Hingga, komunikasi politik yang dilakukan oleh bakal calon Gubernur Jawa Barat pun bermacam-macam mulai dari bentuk dan caranya. Komunikasi Politik yang dilakukan oleh calon gubernur Jawa Barat 2018 menggunakan media maupun non media atau bertatap muka langsung dengan masyarakat disekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum untuk mengangkat persoalan Citarum ini. Tak luput pula permasalahan lingkungan ini menjadi tema dalam debat publik ke II Pilgub Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat.

Citarum menjadi pertarungan ide dan gagasan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mendatang. Berbagai komunikasi politik dilakukan untuk merebut hati masyarakat Jawa Barat. Misalnya saja, Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) mempunyai program bernama “Cikur” atau Citarum kita juara. Dalam program kerjanya Rk-Uu akan menghadirkan Sungai Citarum yang bersih, bermanfaat dan berkelanjutan

---

dengan penegakan hukum dan edukasi kepada pelaku industri dan masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Citarum.<sup>4</sup>

Lain halnya dengan Pasangan calon Gubernur Nomor urut 2 (dua) Tb. Hasanuddin – Anton Charliyan (Hasanah) yang mengangkat isu Citarum Lestari, bahkan dalam debat ke II yang diselenggarakan oleh KPU pasangan yang dikenal dengan nama Hasanah ini pun, menampilkan pertunjukan seni mengangkat isu Citarum lestari. Dalam perspektif komunikasi, komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hasanah ini, langsung bersentuhan dengan masyarakat yang berada di DAS Citarum. Bahkan, pasangan ini pun membuat posko pemenangan di Kampung Batulayang Desa Cikao Bandung Kecamatan Jatiluhur. Dalam persoalan Citarum, pasangan Hasanah ini pun Citarum masuk kedalam salah program unggulan dari 7 program yang diluncurkan yakni “Turkamlibud” yakni, Infrastruktur, Keamanan, Lingkungan, dan Budaya. Hasanah pun mengklasifikasikan ke dalam tiga aspek persoalan Citarum ini, yakni masalah di hulu, tengah dan hilir. Di hulu pihaknya akan melibatkan masyarakat agar mau mengganti tanaman yang dianjurkan, yaitu tanaman yang mampu meresap air. Pasangan Hasanah juga akan melakukan

reboisasi terhadap titik titik yang dianggap kritis. Sementara di bagian tengah, akan mengajak setiap masyarakat yang membuang sampah ke Citarum untuk mengelola sampah dengan baik. Juga melakukan penegakkan hukum terhadap kelompok kelompok yang membuang limbah industri. Sementara untuk di bagian hilir, pasangan Hasanah ini memberikan jaminan nihil polusi dan debit air yang terjaga, khususnya di Danau Saguling, Cirata dan Jatiluhur.

Hasanah memiliki program Turkamling dan Budaya, yang difokuskan untuk menjaga lingkungan di Jawa Barat pelestarian lingkungan, terutama di kawasan DAS Citarum sangat mempengaruhi faktor terjadinya bencana alam lain. Oleh karena itu, program Turkamlingbud adalah solusi yang tepat guna. Padahal banyak potensi yang terkandung dari pelestarian sungai ini, salah satunya untuk pencegahan banjir dan mencegah tanah longsor. Bahkan di titik-titik tertentu keindahannya bisa mendukung pengembangan usaha pariwisata.<sup>5</sup>

Begitupun pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) Sudrajat - Ahmad Syaikh (Asyik) menjadikan Citarum bagian dari konsep strategi kemenangan. Pasangan Asyik pun mempunyai 3 langkah strategis untuk

5

<http://www.rmoljabar.com/read/2018/05/29/76978/Budayawan-&-Pengamat-Lingkungan-Dukung-Program-Turkamlingbud-Pasangan-Hasanah>

<sup>4</sup> <https://pilkada.jpnn.com/news/inilah-nawaitu-9-program-unggulan-pasangan-rindu>

mengatasi permasalahan Citarum yakni; struktural, non struktural, dan kultural. Langkah struktural meliputi Pembuatan tanggul sungai secara optimal, normalisasi aliran sungai dengan mengurangi sedimentasi, pembuatan drainase di sepanjang jalan yang dilalui Citarum.<sup>6</sup>

Lain halnya dengan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 4 (empat) Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi atau dikenal dengan sebutan 2DM. Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar menyiapkan 9 program unggulan. Pasangan yang mempunyai *tagline* “bekerja untuk melayani” ini mempunyai target. Jangka pendek tersebut berupa pemulihan kondisi Sungai Citarum yang hari ini mendapat gelar 'Sungai Terkotor di Dunia', kemudian program 'Zero KJA' sendiri dilaksanakan atas perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke danau buatan terbesar di Indonesia tersebut pada akhir Tahun 2014 silam.<sup>7</sup>

Realitas komunikasi politik yang digunakan para pasangan calon untuk merebut hati publik dengan menggunakan program-program yang dikemas sedemikian apik,

bahkan menggunakan nama-nama khusus agar memudahkan masyarakat untuk mengenali program kerja, hingga membuat posko pemenangan untuk meyakinkan publik. Isu ekologi politik menjadi penting manakala dihadapkan dengan sebuah kontestasi politik. Alih-alih Pertarungan ide dan gagasan untuk membenahi persoalan Citarum dikemas sedemikian rupa oleh seluruh Paslon yang bertarung dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat, guna untuk mendulang dan meraih simpati masyarakat yang berada Jawa Barat terutama masyarakat yang tinggal di sekitaran DAS Citarum.

Namun lebih dari itu bagaimana program ide gagasan yang digulirkan oleh semua pasangan calon paling tidak dapat dikonfersi menjadi suara, yang juga bisa menjadi kebijakan nantinya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di 27 kab/kota Jawa Barat. Juga untuk penganangan permasalahan ekologi nantinya bisa bersinergis antara antara Pemprov, Pemda kab/kota, BUMN terkait. Sebagaimana kerifan budaya lokal konsep pengelolaan lahan Sunda yakni; *Leuwueng kaiyan, Gawir awian, Legok balongan, Dataran sawahan, Lembur urusaneun, Basisir jagaeun, Cinyusu rumatan, Walungan urusaneun.*

<sup>6</sup>

<https://www.inilahkoran.com/berita/jabar/77126/using-program-citarum-harum-ini-3-langkah-asyik>

<sup>7</sup>

<http://www.rmoljabar.com/read/2017/12/29/64219/2DM-Bakal-Fokus-Pemulihan-Sungai-Citarum-Jawa-Barat->

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardianto, Elvinaro dan Q-nees. 2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekama Media. Bandung
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik (Filsafat – Paradigma – Teori – Tujuan. – Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia). Graha Ilmu. Yogyakarta
- Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Creswell, Jhon W. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design; choosing Among Five traditions, Sage Publication, California.
- Hempel Lamont C.1996. Environmental Governance : The Global Challenge Washington, DC: Island Press,
- Kumolo, Tjahyo dan Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu social lainnya, Rosdakarya. Bandung
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung : PT : Remaja Rosdakarya.
- Pawito. 2009. Komunikasi politik media massa dan kampanye pilihan. Jalasutra
- Rauf, Maswadi. Nasrun. 1993. Indonesia dan komunikasi politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Watts, Michael and Nancy Lee Peluso . 2001. Violent Environments. Cornell University Press

### Jurnal

- Adiyana, Slamet. Komunikasi Politik Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat 2008. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume I/No.2/Juni 2010

**Sumber Lain**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  
32 Tahun 2009

<http://bisnis-environment.blogspot.com/2011/03/kerusakan-lingkungan-dan-politik.html>

<http://mahmudisiwi.staff.ipb.ac.id/2010/07/29/beda-ekologi-politik-dan-politik-lingkungan/>

<https://pilkada.jpnn.com/news/inilah-nawaitu-9-program-unggulan-pasangan-rindu>

<http://www.rmoljabar.com/read/2018/05/29/76978/Budayawan-&-Pengamat-Lingkungan-Dukung-Program-Turkamlingbud-Pasangan-Hasanah->

<https://www.inilahkoran.com/berita/jabar/77126/usung-program-citarum-harum-ini-3-langkah-asyik>

<http://www.rmoljabar.com/read/2017/12/29/64219/2DM-Bakal-Fokus-Pemulihan-Sungai-Citarum-Jawa-Barat->